



Filsafat Politik Perspektif Qutb al-Din Al-Shirazi

Rosi Islamiyati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rossi@gmail.com

Abstract ; *When it comes to politics, for some people assume that the most important thing is large area, regional expansion, large mass, or even long-standing power. However, there are other things that are more important than these things namely the ethical, economic and political dimensions. because if power alone is not supported by a good economy, ethics and politics, then the State will still be a bad country and make its citizens will not live comfortably. This research will discuss how the political thinking of Qutb al-Din Al-Shirazi? This research uses descriptive analysis and interpretation methods. The results showed, As-Shirazi discussed political studies into three dimensions, namely ethics, economics and politics. It is interesting that As-Shirazi not only explained the three fields of study of practical philosophy separately. Instead, he concocted the three studies into one and interconnected. When talking about politics, of course it will not be separated from how the economy of a government runs. while politics and economics will not run straight when the ethical dimensions in both fields are underestimated. In fact, then ethics became a regulator and a wall in the two fields of study.*

Abstrak ; *Jika berbicara soal politik, bagi sebagian orang beranggapan bahwa sesuatu yang terpenting ialah wilayah yang luas, ekspansi wilayah, massa yang banyak, atau bahkan kekuasaan yang*

berlangsung lama. Akan tetapi, ada hal lain yang lebih penting daripada hal-hal tersebut yakni dimensi etika, ekonomi dan politik. karena jika kekuasaan semata tanpa ditopang oleh perekonomian, etika dan politik yang baik, maka Negara tersebut tetap akan menjadi Negara yang buruk dan membuat warganegaranya tidak akan hidup nyaman. Penelitian ini akan membahas bagaimana pemikiran politik Qutb al-Din Al-Shirazi? Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan, As-Shirazi membahas kajian politik menjadi tiga dimensi yaitu etika, ekonomi dan politik. Menarik bahwa As-Shirazi tidak hanya menjelaskan ketiga bidang kajian filsafat praktis tersebut secara terpisah. Melainkan, ia meramu ketiga kajian tersebut menjadi satu dan saling berhubungan. Ketika berbicara politik, tentu saja tidak akan terlepas dari bagaimana ekonomi suatu pemerintahan berjalan. sedangkan politik dan ekonomi tidak akan berjalan lurus ketika dimensi etik di dalam kedua bidang tersebut dipandang sebelah mata. Kenyataannya, kemudian etika menjadi pengatur dan tembok pembatas kedua bidang kajian tersebut.

Kata kunci: Al-Shirazi; filsafat Politik.

A. Pendahuluan

Wacana tentang politik di era post-modern ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif dalam pandangan masyarakat. Politik dianggap sebagai sesuatu yang dapat merugikan orang banyak karena identik dengan penyalahgunaan kekuasaan. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri, politik sudah menempati puncak krisis kepercayaan dari rakyatnya. Banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan tersebut misalnya dengan maraknya kasus korupsi di berbagai lini. Mulai dari tingkat bawah seperti lurah hingga tingkat tertinggi sekalipun seperti DPRD, DPR, dan lain sebagainya. Sebagaimana fenomena ditangkapnya pemimpin partai oleh KPK.¹ Tidak hanya itu, bahkan korupsi pembangunan sekolah di Sulsel senilai 7 Miliar.²

¹ Iwan Nugroho, *Mengembangkan Etika Kepemimpinan: Fenomena pada Jabatan Publik, dalam diskusi bulanan Malang Corruption Watch*, Universitas Widyagama Malang, 20 Februari 2013.

² Muhammad Taufiqqurahman, *Tersangkan Korupsi Rp 7 M Ditangkap Saat Hendak Masuk Pesawat*, 14 Januari 2019 dalam DetikNews.com

Bahkan bupati daerah Buton juga ditangkap karena korupsi sebanyak 10 M.³ Fenomena semacam ini bukan lagi menjadi fenomena gunung es belaka tetapi sudah menjadi fenomena yang menjamur di kalangan para petinggi dan pejabat negara. Alih-alih malu dengan perbuatan yang mereka lakukan, banyak di kalangan mereka yang masih tetap melakukan tindak menyalahgunaan kekuasaan setelah selesainya masa tahanan.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi? bukankan mereka orang-orang yang dipilih oleh public dan dipercaya mengemban jabatan? Yang tentu saja juga sudah dibekali pendidikan tinggi dan sistem nilai dalam sistem bernegara? Hal ini jugalah yang kemudian menggelitik telinga para pemikir atau filosof. Bagi para filosof, paradigma politiklah yang berperan di dalam perbaikan. Maka para pemikir muslim bermaksud mengembalikan citra politik ke tempat yang semestinya yaitu dipercayai lagi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu pemikir muslim seperti Al-Shirazi mencoba untuk melihat politik dengan menggabungkan antara ekonomi dan politik yang di bungkus dengan dimensi etik. Bagaimapun, etika sangat berpengaruh di dalam membatasi ruang lingkup politik. Tanpa adanya etika di dalam berpolitik, tentu saja politik menjadi sesuatu kegiatan yang bebas nilai. Ketika menjadi kegiatan yang bebas nilai, tentu saja akan mengakibatkan dampak buruk seperti yang sudah dicontohkan di atas. Maka dari itu, menarik dan relevan jika penulis membedah lebih lanjut bagaimana konsep filsafat politik terutama terkait tulisan Al-Shirazi dalam “The Pearly Crown”. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis dan interpretasi.

B. Sosial-Politik pada masa Qutb al-Din al-Shirazi (Iran abad 13M)

Saat al-Shirazi hidup, keinginan untuk kembali ke masa lalu atau zaman keemasan nabi mulai di bunyikan. Tapi pada kenyataannya, bertolak belakang. Harapan kepada penerus Ismaili untuk mengembalikan politik ke tataran seperti zaman nabi malah digantikan dengan rezim militer yang suram. Banyak yang berpandangan pesimis apakah pemerintahan dan masyarakat yang adil dapat terbentuk? Ternyata tidak. Kekhalifahan mulai runtuh pada masa kehidupan as-Shirazi.

³ Ahmad Akbar Fua, *Terbukti Korupsi, Bupati Buton Selatan Dituntut 10 Tahun Penjara*, 9 Januari 2019 dalam Liputan6.com.

As-Shirazi hidup disaat kondisi sosial politik Iran sedang dalam masa kacau. Baghdad ditaklukan oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Termasuk juga pemimpin Baghdad waktu itu yakni Al-Mu'tasim juga di bunuh oleh raja Mongol tersebut. Setelah sekitar tiga puluh empat hari, sudah banyak penduduk muslimin terbunuh. Setelahnya, Hulagu Khan membentuk kerajaan Ilkhaniyah di Tabriz dan Maragha. Ia juga ditunjuk oleh saudaranya yaitu Mongke Khan untuk mengembalikan kekuasaan Mongol yang lepas sepeninggal Chinggis. Atas kepercayaan saudaranya, kemudian ia berhasil menguasai beberapa wilayah seperti Persia, Irak, Causasus, dan Asia kecil. Sebelum ia menguasai Baghdad, ia sudah terlebih dahulu menguasai Syiah Ismailiyah di daerah Persia Utara pada tahun 1256.⁴

Kekuasaan bangsa Mongol atas Baghdad menimbulkan banyak kerugian. Seperti kehancuran peradaban total, bangunan-bangunan mewah, sekolah-sekolah, perpustakaan sebagai penyimpanan buku-buku berharga juga dihancurkan. Selain dari pada itu, banyak tokoh muslim seperti ahli agama dan penduduk di Baghdad juga dibunuh. Sehingga, saat itulah dunia muslim mulai mengalami kekosongan kekuasaan. Sehingga, dengan mudahnya penguasa Mongol masuk dan menggantikan kekuasaan atas dunia Islam.⁵

Bahkan ketika al-Shirazi bertemu dengan al-Tusi (gurunya). Al-Tusi adalah seorang Syiah yang telah melayani para pemimpin Ismaili. Meskipun ia membenci kekhalifahan dan memainkan peran dalam kehancurannya, tetapi selama hidupnya ia memberikan kontribusi dengan menulis etika *nasirea* sebelum invasi Mongol. Dia masih bisa membayangkan kemungkinan adanya aturan yang adil. Di sisi lain, Al-Shirazi masih muda ketika Mongol menyerbu tanah Islam dan Baghdad. Sebagian besar kehidupan dihabiskan di istana Mongol dengan pekerjaan melayani raja-raja kafir. Ketidaksanggupan masyarakat muslim ketika itu untuk melawan para raja dari Mongol menyebabkan mereka hanya melakukan apapun serta tunduk pada perintah raja Mongol. Karena kerajaan Mongol terkenal sebagai kerajaan terkuat dan belum ada yang menandingi di dunia ini.

⁴ Budi Sujati dan Nita Yuli Astuti, *Politik Penguasaan Bangsa Mongol Terhadap Negeri-Negeri Pada Masa Dinasti Ilkhan (1260-1343)*, dalam jurnal Rihlah Vol. 06 No. 01/2018

⁵ Budi Sujati dan Nita Yuli Astuti, *Politik Penguasaan Bangsa Mongol Terhadap Negeri-Negeri Pada Masa Dinasti Ilkhan, Ibid...*

Pada saat itulah karya al-Shirazi tentang “The Pearly Crown” ditulis. Ia telah melayani orang-orang Mongol selama hampir setengah abad dengan kondisi peperangan. Pada saat itu, mungkin ada harapan bahwa raja-raja Mongol akan menjadi muslim.

Jelas bahwa al-Shirazi menganggap kehidupan politik sebagai wilayah monarkhi absolut. Artinya, pemerintah berada di luar pengaruh individu atau akal. Politik adalah bagian dari korpus filosofis, karena selalu begitu. Tapi, ketika al-Farabi telah melangkah lebih jauh dengan memasukkan dimensi metafisika ke dalam politik - sebuah langkah yang berani dalam membentuk nuansa politis yang baru. Sebaliknya, al-Shirazi masih berkuat pada dimensi etik dengan mengurangi unsur politik dan memberikan perintah etis terhadap raja. Definisi politik yang pada awalnya diartikan sebagai, diskusi tentang topik-topik seperti klasifikasi negara, struktur pemerintahan dan negara, dan sejenisnya. Tetapi, di tangan al-Shirazi politik menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian politik hanya diartikan sebagai cabang etika yang berlaku bagi mereka yang menjalankan kerajaan. Titik tekan pemikiran politiknya memang terletak pada etika yang ditunjukkan dalam perubahan definisi filsafat politik dari pengantar bukunya “The Pearly Crown”. Di mana politik dikatakan studi tentang kerjasama manusia dalam masyarakat.

Hal ini bukan dimaksudkan bahwa pembahasan politik al-Shirazi tidak memiliki tujuan yang jelas. Tujuan filsafat politik adalah untuk membimbing raja sehingga membantu dia mempraktekkan seni memimpinnya dengan benar, dan mendorongnya untuk memerintah dengan adil. Filosofi politik menjelaskan kepada raja bagaimana etika berlaku sehingga menjadi basis di dalam proses pemerintahannya. Ia hendak menjelaskan bahwa politik seharusnya tidak bertentangan dengan Ilmu Agama dan keadila.

Selain itu, karakteristik filsafat politik al-Shirazi juga menarik. Ia menggunakan metode logis untuk menampilkan politiknya; dialektika daripada demonstrasi. Tujuan penulisan risalah tentang politik bukanlah untuk menyimpulkan kebenaran dari asosiasi politik manusia, tetapi untuk membujuk raja untuk memerintah dengan cara yang terbaik.

C. Biografis Qutb Al-Din Al-Shirazi

Qutb al-Din Mahmud Mas'ud al-Shirazi atau lebih dikenal dengan Al-Shirazi lahir dari keluarga yang berlatar belakang dokter di Shiraz pada tahun 1236 M. Ketika usianya menginjak empat belas tahun, ia mewarisi posisi ayahnya sebagai staf dokter di salah satu

rumah sakit di Shiraz. Selain sebagai staf dokter, ia juga sebagai mahasiswa yang belajar teori medis lanjutan dan belajar ilmu agama kemudian menjadi Qadi dan menulis berbagai karya tentang agama. Ia juga sudah dijuluki sebagai sufi sejak dini karena ayahnya merupakan murid dari Suhrawardi.

Ketika usianya menginjak dua puluh satu tahun, kota Baghdad dan Shiraz sudah merdeka dari Mongol dan keadaan menjadi damai. Setelahnya, ia berguru kepada al-Tusi di daerah Maraghah. Meskipun yang menjadi fokus utama al-Shirazi ialah dunia medis dan kedokteran, tapi di Maraghah ini ia belajar tentang filsafat dan matematika hingga tahun 1280 M. Setelahnya, ia kemudian menjadi seorang *Qadi* di Malatya dan Sivas dan mulai menulis karya ilmiahnya secara serius. Tahun 1290 M, ia menghabiskan waktunya di Tabriz. Ia menerbitkan karya-karyanya tentang astronomi dan medis (obat-obatan). Di samping karya-karyanya tersebut, ia juga menulis tentang matematika dan agama. Tulisannya tentang tema filsafatnya ialah komentarnya terhadap filsafat Illuminasi Suhrawardi dan ensiklopedia filsafat Persia yang berjudul “The Pearly Crown”.

Sebenarnya tidak ada karya Al-Shirazi yang langsung mengacu pada politik. Tetapi perbincangannya tentang politik termuat di dalam ensiklopedia filosofisnya tersebut. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang tulisannya yang terkait dengan politik, perlu kiranya penulis memahami bagaimana kehidupan Al-Shirazi. Dikarenakan ia berasal dari keluarga yang terhormat, maka ia seharusnya memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh besar seperti al-Tusi. Al-Tusi merupakan seorang yang memainkan peran di dalam politik Islam dalam satu generasi. Dia merupakan salah satu dari dua belas orang Syi’ah yang tugasnya melayani tentara dan menjadi penasihat yang dipercaya dan telah menemani pendudukan Mongol di Baghdad. Beliau merupakan direktur dari tahun 1259-1294 M di bawah pemerintahan Mongol. Dan sampai kematiannya ia tetap menjadi anggota pengadilan (*Qadi*). Kelihatannya, ar-Razi mengenal dunia pengadilan ketika ia menjadi murid dari al-Tusi.

Setelah meninggalkan perkuliahan, ia melanjutkan untuk meneliti dan meminta dukungan dari pemerintahan. Setiap tulisannya di dedikasikan untuk pejabat pemerintahan, yang umumnya seorang Wazir di istana Mongol. Dalam perjalanan karirnya ia di bayar besar oleh pemerintah untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Tetapi karena ia memiliki saingan-saingan di dalam pengadilan, kemudian ia juga berpindah-pindah tempat untuk dapat menyelamatkan hidupnya.

Pada tahun 1282 M, ia dikirim ke Mesir menjadi delegasi konverensi untuk hubungan persahabatan Islam Mongol. Pengetahuan al-Shorazi tentang politik praktisnya di bentuk oleh karakter kerajaan monarki forign.

D. Pemikiran Politik Al-Shirazi di dalam Karyanya “The Pearly Crown”

Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa tulisan al-Shirazi tentang politik terdapat pada karya ensiklopedi filosofis yang berjudul “ the Pearly Crown” dan juga terdapat pada komentar-komentarnya tentang filsafat illuminasi Suhrawardi. Pertama, penulis akan membahas tentang filsafat politik yang ada di dalam karyanya “The Pearly Crown”. “The Pearly Crown” merupakan ensiklopedi filosofis besar yang di tulis dalam bahasa Persia. Dalam pengantarnya, buku ini berisi lima pokok yaitu logika, filsafat pertama, psikologi, matematika, dan teologi rasional. Selain itu, dalam buku ini, ia menambahkan tulisannya tentang teologi dogmatic, hukum agama dan filsafat praktis, etika, ekonomi dan politik, dan mistik. Buku ini ditujukan untuk Amir Bajaj, salah seorang penguasa Gilan karena ia melarikan diri dari Tabriz karena tidak disukai. Buku ini di tulis sebelum beberapa tahun kematian al-Shirazi.

Buku ini ditujukan untuk orang-orang awam yang berpendidikan. Ada dua kejanggalan dan penulisan buku ini. *Pertama*, buku ini ditulis dalam bahasa Persia dan bukan Arab, padahal buku-buku bahasa Arab adalah karya yang paling banyak dipelajari dari pada buku dalam bahasa Persia. *Kedua*, sebagian besar karya-karya yang diterjemahkan dan diminati ialah yang terkait dengan geometri, astronomi, teologi domatik, mistisisme dan lainnya seperti politik. Dalam tulisannya ini, al-Shirazi menulis bagian-bagian pokok tentang filsafat dan bisa diterima oleh tradisi *Avicennan*.

Tambahan tulisan selain dari pada lima pokok tulisan utama al-Shirazi, dimaksudkan karena permintaan dari “pelindungnya”. Tulisan-tulisan tentang politiknya hanya merupakan tambahan ketika ia berada pada masa pengasingan dan pelindungnyalah yang memberikan usul untuk menambahkan beberapa tema terkait dengan politik. Adapun tulisan al-Shirazi terkait politik antara lain tentang “the nature of political philosophy”.

1. The Nature of Political Philosophy

Di dalam pengantar buku “The Pearly Crown”, al-Shirazi membagi filsafat praktis menjadi tiga bagian yaitu etika, ekonomi, dan politik. Seperti yang dikatakan ar-Razi bahwa, “practical philosophy is the knowledge of useful voluntary motions and actions of artifice of the human species insofar as they aid in meeting their practical and spiritual needs and lead to attaining one which concern the individual in isolation and the other which relates to groups insofar as they cooperate. The second class also has two divisions; one relating to the group that cooperates as the a family and household and the second relating to the group that cooperates in a city, province, or even clime or empire. Therefore, practical philosophy has these divisions; the first called which relates to groups insofar as they cooperate. The second class also has two divisions; one relating to the group that cooperates as the a family and household and the second relating to the group that cooperates in a city, province, or even clime or empire. Therefore, practical philosophy has these divisions; the first called the reformation of morals, the second the management of households and the third the political regime.”⁶

Filsafat praktis berarti suatu bentuk tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan juga spiritual dengan tujuan untuk mencapai kepuasan individu dan kelompok sejauh mereka berdua (individu dan kelompok) berkerjasama. Kelas pertama tentang etika ialah bagaimana antara individu dengan kelompok dapat bekerjasama sehingga disebut dengan reformasi moral, kelas kedua yang terkait dengan ekonomi ialah di definisikan sebagai manajemen rumah tangga dimana antara individu dengan kelompok dapat bekerjasama layaknya hubungan keluarga, dan yang ketiga tentang politik ialah bentuk kerjasama antara kelompok dalam satu wilayah yang lebih tinggi yaitu kota, provinsi, maupun kerajaan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga disebut sebagai rezim politik.

Jadi dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa di dalam aspek-aspek filsafat praktis yang terpenting ialah bagaimana kerjasama antara individu dengan kelompok dapat terjalin untuk dapat mencapai kebutuhan fisik dan psikologis (spiritual).

⁶ Muhsin S. Mahdi, *The Political Aspect of Islamic Philosophy*, (Princeton: Princeton University Press), h. 364.

2. Konsep tentang Kepemimpinan Religius dalam *The Pearly Crown*

Bergesernya konsep kepemimpinan di abad modern ini hampir mengidentikkan kepemimpinan dengan kekuasaan, yang dapat menghadirkan timbulnya malpraktek kekuasaan yang akan berwujud kepada penyalahgunaan wewenang.⁷ Dikarenakan citra politik yang terlanjur negatif dikalangan masyarakat, maka perlu adanya perubahan paradigma kepemimpinan. Dengan itu, Al-Shirazi membawa wajah baru di dalam wacana perpolitikan. Salah satunya ialah tentang perpaduan antara politik dengan dimensi etik dan religiusitas. Hal ini termaktub dalam karyanya tentang “*The Pearly Crown*”.

Sebelum berbicara lebih lanjut terkait konsep al-Shirazi tentang kepemimpinan religius, perlu kiranya penulis artikan tentang kepemimpinan religius. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara kepemimpinan religius dan kepemimpinan spiritual. Keduanya berangkat dari unsure keilahian karena religiuspun asalnya dari tuhan (dalam perspektif Islam). Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual (keilahian). Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hamba-Nya dengan cara yang bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Dalam hal ini, kepemimpinan spiritual dapat diartikan juga sebagai kepemimpinan berdasarkan etika religius.⁸ Kepemimpinan yang dapat menghadirkan sifat-sifat keilahian seperti implementasi sifat *jamal* dan *jalal*-Nya sebagai tujuan, proses, budaya, dan perilaku kepemimpinan.

Selanjutnya, penulis akan sedikit menerangkan terkait dengan arti yang sebenarnya dari kepemimpinan religius al-Shirazi. Kepemimpinan religius menurutnya tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Nilai agama dapat menjadi bagian pokok di dalam proses kepemimpinan. Seperti pernyataan berikut:

“the most basic ethics in leadership is responsibility. Humans living in this world is called leader. Therefore, as a leader, humans hold responsibility, at least to themselves. A husband and a wife are responsible for their children, an employer is to the workess, and a

⁷ A.F Djunaedi, *Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam*, dalam Jurnal Al Mawardi edisi XIII Tahun 2005.

⁸ Haqiqi Rafsanjani, *Kepemimpinan Spiritual*, dalam Jurnal Masharifi al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2. No. 1, 2017.

top leader is to his subordinates. A president, a governor, and a regent are accountable to the people they lead.”⁹

Dalam uraian di atas, dijelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan memiliki potensi sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan, bahwa setiap manusia juga memiliki kecenderungan untuk bertanggungjawab. Seperti dalam ruang lingkup kecil, suami bertanggungjawab terhadap istri, ayah terhadap anaknya. Dan jika di tarik ke ranah yang lebih luas yaitu negara, maka pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinya. Seperti, relasi terhadap pemimpin yang ada di bawahnya dan terhadap rakyat.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Al-Shirazi, di dalam komentarnya terhadap filsafat Illuminasi Suhrawardi akan di dapat penjelasan tentang hubungan antara roh manusia dengan fisik. Roh dapat mengontrol tubuh material. Antara tubuh yang sifatnya fisik dan roh yang sifatnya psiko merupakan sesuatu yang nyata sehingga Tuhan menciptakan dunia yang berisi kebutuhan fisik dan kebutuhan material. Tuhan menganugerahi manusia untuk dapat mengatur yang psiko sehingga manusia dapat melanjutkan kehidupannya. Kebahagiaan yang dimaksud ialah apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara keduanya di ibaratkan sebagai hubungan pemerintahan.

Selain dari pemenuhan kebutuhan, pemikiran politik al-Shirazi juga tentang bagaimana pembatasan perilaku manusia (etika). Dengan demikian, bagi al-Shirazi perlu adanya pemerintahan yang tunduk pada konsep kebajikan yang di dasarkan atas etika, ekonomi, dan politik.

Pertama, bahwa kebutuhan hidup material manusia yang bersifat pokok yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupannya seperti air, biji-bijian, permainan dan kayu bakar dimiliki dan tersedia untuk bersama. Sedangkan yang lainnya merupakan milik individu.

Argumen kedua, tentang kepemimpinan ialah konsep tentang kebajikan. Hal tentang jiwa ia peroleh dari buku jiwa dalam *Republic*, Plato, yang menyatakan bahwa jiwa terdiri dari tiga bagian yaitu kecerdasan, keinginan, dan kemarahan atau bisa juga semangat. Sehingga pengertian dari etika menurut ar-Razi adalah kombinasi dari tiga unsur jiwa tersebut dan keseluruhannya didominasi atau diatur oleh akal. Sedangkan tentang kebijakan moral, ia peroleh dari buku Aristoteles dalam *Nicomachean*. Kemudian ia melampaui politiknya

⁹ Umar Sidiq, *Kepemimpinan Islam: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Hadits*, dalam jurnal *Dialogia* Vol 12 No. 1 Juni 2014.

Sokrates dengan mengatakan bahwa orang yang benar-benar berbudi luhur harus membiasakan jiwanya.

Dengan demikian, al-Shirazi berpendapat bahwa, spirit manusia dibedakan menjadi tiga kelas. Kelas pertama ialah mereka hanya perlu tahu apa yang benar, yaitu apa yang baik dan kondusif untuk diri sendiri dan orang lain, lalu melakukannya. Yang kedua ialah mereka yang berada pada kelas terburuk, karena mereka hanya menurut apa yang mereka inginkan tanpa mengakui apa yang benar (kebenaran). Dan ketiga, saling berhubungan atau kelas menengah dimana kadang-kadang ia sudah dapat dikontrol oleh akal dan ilmu agama tetapi terkadang ia tidak bisa menahan dirinya. Sehingga, etika cukup untuk mengatur orang-orang yang berada di kelas pertama dan rezim politik diperlukan untuk mengatur orang-orang yang berada di kelas kedua dan ketiga.

E. Politik dalam Komentar terhadap Filsafat Illuminasi Suhrawardi

Pertama-tama al-Shirazi membahas tentang doktrin kutub yang disinggung oleh Suhrawardi di akhir pengantar filsafat illuminasinya. Komentarnya terhadap filsafat illuminasi juga menjadi pemikiran al-Shirazi tentang politik. Mulanya, Suhrawardi mengatakan tentang doktrin kutub yang berisi tentang kepemimpinan *illahiyah*. Ia menyatakan bahwa ada seseorang yang tersembunyi kehadirannya di setiap zaman yang bertugas untuk menjaga dunia dari kehancuran. Jika ada satu orang yang baik dalam iman dan filsafat, maka ia dianggap sebagai khalifah di bumi meskipun tidak ada yang mengenali otoritasnya. Seperti al-Farabi, yang menyatakan bahwa penguasa atau martabat kepemimpinan yang seperti itu merupakan karakter pemimpin yang spiritual dan tidak membutuhkan kekuatan politik atau politik bukan sesuatu yang diperlukan. Tapi apabila sebaliknya, Suhrawardi menambahkan:

“but if the state in is his hand, that age will be luminous. If the age is without divine government, darkness will predominate”.¹⁰

Apabila di dalam suatu negara terdapat pemimpin yang *illahiyah*, maka negara tersebut akan bersinar (makmur, sejahtera) tapi apabila sebaliknya, tidak terdapat pemimpin yang bersifat *illahiyah* di dalam suatu negara maka akan terjadi kegelapan.

¹⁰ Muhsin S. Mahdi, *The Political Aspect of Islamic Philosophy, Op.C it.*, h. 368.

Menurut Suhrawardi, pemerintahan itu harus berada di bawah seorang pemimin yang di pilih Illahi. Kemudian komentar dari al-Shirazi berbanding terbalik dengan apa yang telah dikatakan Suhrawardi, baginya; “ the age will be luminous in that he makes possible the spread of knowledge, philosophy, justice, and the rest of the praiseworthy qualities and that he bears the people on the white path by his own capacity for knowledge and deeds, as in the ages of the prophets and divine philosopher.....”darkness will predominate” as in the age false religious, after the time of the prophets, and during the usurpation of the dark and ignorant, such as in our time when the divine laws have become weak, events have succeded events, paths and ways have been erased, and intellectual levels and degrees have been effaced”¹¹.

Suatu zaman atau negara akan bersinar apabila ilmu pengetahuan, filsafat, keadilan, dan perbuatan baik disebarakan, sehingga mereka berada di jalan yang lurus seperti zaman para nabi dan filsuf ilahi. Dan sebaliknya, suatu zaman atau negara akan mengalami masa kegelapan apabila agama palsu setelah sepeninggal nabi tidak diketahui dan diperhatikan, seperti zaman ketika hukum Tuhan tidak ditegakkan, dan pengetahuan memiliki kedudukan yang rendah. Sehingga terlihat jelas bahwa pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan raja atau filsuf mistik bukanlah menjadi pilihan. Sehingga, penguasa harus bergerak sesuai agama dan hukum. Dari uraian di atas, penulis dapat melihat bahwa yang menjadi pokok di dalam politiknya bukan hanya seorang pemimpin tetapi juga aspek yang lebih mendukung dari pada pemimpin itu sendiri.

F. Konsep tentang Raja Kontemporer

Menurut banyak pemikir muslim, seperti al-Farabi, Suhrawardi, dan al-Tusi, kerajaan memiliki konsekuensi intelektual dan spiritual. Tapi bagi al-Shirazi, untuk Nizam Malik, kerajaan hanya masalah kekuasaan politik. Seperti yang dikatakannya;

“protection of and care for subjects is absolutely and unequivocally binding upon the king for two reason. The first reason is that subjects are the basis of domination and kingship, for it there had been no subjects. There would have been no king. If there were no longer any subjects, there would no longer be a king. The greather the number of subjects, the greather the domination of a king.

¹¹ *Ibid.*, h. 369.

Therefore, subjects are the basis of kingship. If the root is preserved , than the branch will endure”¹²

Yang di maksud dengan kekuasaan adalah rakyat. Jadi, bagi Nizam Malik, rakyat menjadi basis kekuasaan atau dominasi raja. Sehingga tidak ada raja jika tidak ada rakyat. Dan semakin banyak rakyat maka semakin besar dominasi raja. Karena itu, rakyat menjadi dasar dari kerajaan. Karena devinisi raja ialah seseorang yang memiliki rakyat, kewajiban raja sebagai raja adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan rakyatnya, dan seni kedudukan raja adalah, seni memperoleh dan melestarikan subjek. Kekayaan juga dikatakan sebagai dasar kedudukan raja; tetapi kekayaan, al-Shirazi menunjukkan, didasarkan pada subyek. Jadi ini juga berarti bahwa raja berkewajiban melestarikan rakyatnya.

Langkah kedua argumen al-Shirazi bahwa karena raja qua raja berkewajiban melindungi subjeknya dan karena hanya dengan keadilan bahwa subjek yang dilindungi, raja memiliki kewajiban untuk memerintah dengan adil. Al-Shirazi dengan cepat menunjukkan bahwa raja tidak perlu berkeinginan untuk berbuat baik agar dia ingin memerintah dengan adil. Keadilan sangat penting untuk pemeliharaan setiap masyarakat bahkan yang ada untuk tujuan jahat, seperti sekelompok penjajah. Keadilan, dalam arti politiknya, berarti bahwa subyek bertindak adil satu sama lain dalam kewajiban bersama mereka dan bahwa raja juga bertindak adil dengan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Berpikir bahwa mungkin, raja seharusnya tidak bertindak tidak adil, untuk keuntungan apa pun yang mungkin diperolehnya dengan praktik-praktik tajam atau tindakan opresif akan lebih dari diimbangi oleh kerusakan yang dilakukan karena subyek mengikuti teladannya dan melemahkan pondasi rezim. Untuk mengilustrasikan hal ini, ar-Razi menceritakan bagaimana raja-raja Sassanian memiliki kebiasaan untuk menyelenggarakan pengadilan khusus bagi mereka yang ingin membawa tuntutan terhadap raja. Raja akan mengikat dirinya dengan sumpah untuk menilai kasus-kasus ini dengan adil. Yazdigird menghentikan praktik ini, dan kerajaan segera jatuh.

Filsafat politik al-Shirazi tidak hanya menekankan pada moralitas yang mungkin saja sifatnya idealis, tetapi pada realitas kehidupan. Sebagai contoh, beberapa bab tentang berurusan dengan pejabat bawahan tentang bagaimana mendelegasikan wewenang tanpa memberi para pejabatnya kesempatan untuk menindas rakyat.

¹² *Ibid.*, h. 369-370.

Gubernur, misalnya, harus dipilih dengan hati-hati dan diberi konseling untuk tidak menindas rakyat provinsi mereka. Ketika ia menjatuhkan hukuman, ia harus juga mengamati keadilan - yang harus dikatakan, ia harus melakukan moderasi - baik untuk kelebihan maupun devisensi akan merugikan rezim. Dia harus menjalankan keadilan atas para pelayannya, tidak terlalu keras atau terlalu memanjakan.

Selanjutnya tentang bagaimana seharusnya raja bersikap dan memiliki karakter ialah ditunjukkan dengan bagaimana seorang raja dapat bekerja sama dengan penasihatnya. Raja harus berkonsultasi dengan penasihatnya. Segala keputusan tidak murni kemudian diputuskan oleh sang raja tanpa pertimbangan penasihatnya, seperti yang ditunjukkan oleh contoh nabi. Al-Shirazi mendiskusikan keuntungan dan kerugian yang dihadapinya dengan penasihat secara terpisah dan bersama-sama dan menjelaskan keuntungan yang diberikan kepada penguasa ketika dia berbagi tanggung jawab untuk orang-orang yang tidak populer bagi dirinya sendiri. Keputusan untuk berperang adalah kasus khusus; jika ada keraguan apapun, perdamaian harus selalu dirangkul.

Terkait dengan sains, "kadang-kadang kebaikan rezim mengharuskan melanggar hukum agama". Kenyataannya, bagaimanapun para penguasa yang saleh, seperti Salomo dan para khalifah yang adil, menunjukkan bahwa mungkin untuk mengikuti hukum Tuhan dan kebaikan rezim. Bagaimanapun, raja harus rajin mengikuti agama. Akibatnya, kekayaan apa pun yang diperolehnya harus diperoleh hanya dengan maksud bahwa itu digunakan untuk membantu Islam.

Makna panjang umur bagi raja ialah doa-doa dari rakyatnya. Karena kehidupan yang sejahtera didapatkan dari kesusahan-kesusahan terlebih dahulu, maka raja harus siap menerima kesusahan demi rakyatnya. Ini merupakan konsekuensi dari doa-doa rakyatnya.

Sifat yang harus dimiliki raja antara lain ialah dermawan, bahwa raja harus bermurah hati. Demi terciptanya stabilitas rezimnya, seorang raja harus memberikan contoh yang baik seperti yang dilakukan nabi Muhammad dan pepatah "tidak ada raja tanpa pengikut, dan tidak ada pengikut tanpa uang". Seorang raja harus menghabiskan uangnya dengan dua cara, pertama memberikan gaji tepat pada waktunya dan yang kedua memberikan hadiah dan sedekah kepada orang-orang yang layak. Dari hal yang demikian, terlihat bahwa seorang raja harus taat terhadap Hukum Islam terkait dengan

pembelanjaan harta. Sehingga dari hal ini pula, seorang raja dapat membujuk dan mendapatkan hati rakyatnya.

Selanjutnya, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja antara lain. Raja harus rendah hati. Artinya, sifat seorang raja yang rendah hati harus mengalahkan sifat ulama yang sudah terlebih dahulu rendah hati karena ulama adalah seseorang yang di khususkan oleh Tuhan. Dan ia harus rendah hati dihadapan rakyatny. Dan menunjukkan sedikit kerendahan hati kepada bangsawan dan tidak berlebihan dalam sifat ini sehingga ia tidak juga di pandang rendah dan kehilangan rasa hormat karena terlalu rendah hati. Selain dari pada itu, hubungan antara raja dengan rakyat dalam hal kepemimpinan juga telah dijelaskan oleh al-Shirazi. Ia menyatakan bahwa, raja harus tunduk pada rakyat seperti kepala tunduk pada tubuh yaitu ia harus memperhatikan kebutuhan tubuh.

Meskipun tidak secara spesifik ia membahas terkait dengan bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan yang ideal, al-Shirazi juga sangat fokus terhadap etika. Ia mengatur bagaimana etika raja terhadap rakyat, begitu pula sebaliknya dan bagaimana etika raja terhadap penasihat, be

gitu pula sebaliknya. Misalnya, ketika rakyat bertemu di dalam gedung pemerintahan raja atau kerajaan , dia harus bersih dan mengenakan pakaian terbaiknya, masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu, dan duduk di tempat yang benar yang telah disediakan. Makna menteri, gubernur, khalifah, dan raja juga dijelaskan. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga martabat sang raja. Sedangkan raja tidak diperkenankan untuk marah dan senang terhadap apapun. Dia harus memberitahukan tempat dimana ia tidur, seperti dulu yang terjadi di kediaman raja Dhili (timur leste) yang mempersilahkan wartawan untuk melihat langsung dimana raja tidur. Selain tu, raja tidak diperbolehkan untuk meminum anggur atau mabuk .

G. Interpretasi Pemikiran Politik Qutb al-Din Al-Shirazi

Jika dibandingkan dengan filsuf sebelumnya seperti Aristoteles, al Farabi, maupun Al-Tusi, di dalam kedua karyanya di atas Al-Shirazi memang tidak secara spesifik menyebutkan konsep negara ideal. Hal ini hanya terbatas pada pembahasan tentang bagaimana kehidupan religius seorang penguasa. Kenyataannya tidak ada pembahasan tentang sistem pendidikan dalam membentuk masyarakat untuk menjadi seseorang yang dapat memajukan bangsanya. Bagi al-Shirazi, monarki absolute menjadi satu-satunya rezim yang dianggap mungkin. Menurut Muhsin S. Mahdi, sebenarnya hal ini lebih dekat

dengan rezim Nizam al-Mulk yang berisi tentang aturan untuk raja. Ia mengindikasikan bahwa al-Shirazi mendapatkan gelar sebagai orang yang mendekati politik Nizam al-Mulk. Dia juga mengatakan bahwa al-Shirazi tidak memahami filsafat politik lain dan hanya menerjemahkan kata-kata al-Farabi sehingga menjadi bagian dari buku *the pearly crown*-nya. Di dalam buku itu jelas yang menjadi penting dalam dunia politik ialah bagaimana seharusnya raja berperilaku.

Terkait dengan hubungan antara politik dengan etika tentang doktrin kebahagiaan, al-Shirazi berbeda dengan al-Farabi dan al-Tusi bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang baik dapat dibudayakan. Baginya, pemerintah yang baik tidak dapat menetapkan kondisi kebahagiaan akan dapat di raih, itu hanya mencegah kondisi yang membuat tidak bahagia saja seperti tugas pemerintah hanya berkutat pada memerintah dengan adil dan mencegah penindasan. Kebahagiaan tertinggi terletak pada pribadi dan tidak tergantung dari bagaimana peremintahannya. Ia juga melihat bahwa tanpa adanya pengekanan terhadap pemerintah akan menyebabkan yang kuat menindas yang lemah. Kewibawaan penguasa yang adil tidak dapat memperbaiki karakter orang-orang yang kacau dan orang yang berkarakter jahat. Namun orang yang benar-benar baik, merekalah yang menuruti nalar dan hukum agama dan hanya perlu dilindungi dari penindasan orang yang jahat. Sehingga kebahagiaan tertinggi adalah masalah pribadi dan terlepas dari kualitas pemerintahan. Artinya, tugas pemerintah bukan membuat orang menjadi baik dan bahagia tetapi hanya sebatas mencegah kondisi yang memungkinkan untuk tidak bahagia missal dengan melindungi dari kejahatan dan menindaklanjuti ketidakadilan dan bukan membuat rakyat menjadi bahagia. Kebahagiaan rakyat terletak pada dirinya sendiri.

Dalam tulisan akhirnya, al-Shirazi mentakan bahwa; “it ought to be known that the king is aqual in his humanity with everyone else and, in the time before time began, god did not make the people worship and serve the king. Therefore, god’s having choosen him from among all others to be king, to rule, and to command and be obeyed, and his choosing others to be subjects under his rule and command an be nothing less than sheergrace on the part god most high”¹³

Artinya bahwa, kedudukan raja dengan rakyat dan yang lainnya ialah sama dalam hal kemanusiaan. Pada masa penciptaan, Tuhan

¹³ *Ibid.*, h. 377-378.

tidak menciptakan manusia untuk menyembah dan melayani raja. Tuhan hanya memilih dan tidak menciptakan diantara manusia tersebut menjadi raja untuk memegang kekuasaan atau memerintah, dan untuk di oatuhi, dan memilih yang lain menjadi rakyat di bawah pemerintahannya dan tidak diperbolehkan untuk takluk seperti takluknya kepada Tuhan.

H. Kesimpulan

Berpijak pada uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran filsafat politik al-Shirazi lebih dekat kepada etika atau bagaimana seharusnya raja berperilaku terhadap (rakyatnya). Hal ini tentu saja tidak dapat terlepas dari realitas pemerintahan pada saat itu dimana Mongol telah menguasai Baghdad dengan dominasi raja-raja Mongol terhadap rakyat dan abdi kerajaan. Selain dari pada itu, filsafat politik al-Shirazi juga lebih dekat terhadap agama dan hukum Islam. Ketentuan untuk menaati perintah agama menjadi penekanan di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Akbar Fua, Ahmad. *Terbukti Korupsi, Bupati Buton Selatan Dituntut 10 Tahun Penjara*, 9 Januari 2019 dalam Liputan6.com
- Budi Sujati dan Nita Yuli Astuti, *Politik Penguasaan Bangsa Mongol Terhadap Negeri-Negeri Pada Masa Dinasti Ilkhan (1260-1343)*, dalam jurnal Rihlah Vol. 06 No. 01/2018
- Djunaedi, A.F. *Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam*, dalam Jurnal Al Mawardi edisi XIII Tahun 2005
- Muhsin S. Mahdi, *The Political Aspect of Islamic Phylosophy*, (Princeton: Princeton Univercity Press), hlm. 369-370
- Nugroho, Iwan. *Mengembangkan Etika Kepemimpinan: Fenomena pada Jabatan Publik, dalam diskusi bulanan Malang Corruption Watch*, Unversitas Widyagama Malang, 20 Februari 2013
- Rafsanjani, Haqiqi. *Kepemimpinan Spiritual*, dalam Jurnal Masharifi al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2. No. 1, 2017
- Sidiq, Umar. *Kepemimpinan Islam: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Hadits*, dalam jurnal Dialogia Vol 12 No. 1 Juni 2014

Taufiqqurahman, Muhammad. *Tersangkan Korupsi Rp 7 M Ditangkap Saat Hendak Masuk Pesawat*, 14 Januari 2019 dalam DetikNews.com